



EVALUASI PUSAT-PUSAT PERMUKIMAN DI KOTA TOMOHON

Kheysie Palit¹, Sonny Tilaar¹, Surijadi Supardjo¹

Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi

E-mail : kheysietrinity03@gmail.com; sonny_tilaar@unsrat.ac.id; surijadisupardj@unsrat.ac.id

Received : Juli 2025 Reviewed: Des 2025 Published: Juli 2026

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat permukiman di Kota Tomohon mendorong kebutuhan akan evaluasi distribusi dan fungsi pusat-pusat permukiman agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi 44 kelurahan di Kota Tomohon dengan pendekatan spasial dan kombinasi kuantitatif-kualitatif, menggunakan empat metode, analisis: skalogram, indeks sentralitas, aksesibilitas, dan gravitasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sebagian penetapan pusat pelayanan dalam RTRW Kota Tomohon 2014–2034 dengan kondisi aktual. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa tidak semua kelurahan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan memiliki peran sesuai dengan karakteristik fasilitas dan interaksi wilayahnya. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian kebijakan perencanaan tata ruang agar pusat-pusat pelayanan permukiman di Kota Tomohon dapat berfungsi secara optimal, adil, dan merata.

Kata kunci: Pusat Permukiman, Ketersediaan, Sarana, Evaluasi.

ABSTRACT

The rapid growth of settlements in Tomohon City necessitates an evaluation of the distribution and function of settlement centers to align with the principles of sustainable development. This study evaluates 44 urban villages (kelurahan) in Tomohon City using a spatial and mixed-methods approach (quantitative and qualitative), applying four analytical methods: scalogram, centrality index, accessibility, and gravity analysis. The results indicate a mismatch between some of the designated service centers in the 2014–2034 Spatial Plan (RTRW) of Tomohon City and the actual conditions in the field. The analysis reveals that not all urban villages assigned as service centers possess the characteristics or supporting facilities to fulfill those roles effectively. This study recommends revising the spatial planning policies to ensure that settlement service centers in Tomohon City function optimally, equitably, and contribute to balanced regional development.

Keywords : settlement center, availability, facilities, evaluation.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat memicu peningkatan kebutuhan akan hunian, infrastruktur dasar, dan fasilitas pelayanan publik. Namun, persoalan utama bukan hanya pada kuantitas

permukiman, melainkan pada bagaimana distribusinya dapat menjamin kualitas hidup serta keberlanjutan lingkungan. Fenomena ini menuntut perencanaan pusat-pusat permukiman yang tidak hanya terpadu secara spasial, tetapi juga selaras dengan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.



Kota Tomohon, salah satu kota strategi dan pengangga di Provinsi Sulawesi Utara, mengalami pertumbuhan permukiman yang sangat signifikan dalam beberapa

dekade terakhir. Aksesibilitas yang baik dan letaknya yang strategis mendorong tingginya minat masyarakat untuk bermukim di wilayah ini. Namun, perkembangan yang pesat tidak selalu diikuti dengan pemerataan fasilitas dan infrastruktur antar wilayah. Ketimpangan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola persebaran dan fungsi pusat-pusat permukiman di kota ini.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji struktur permukiman dan hierarki pusat pelayanan dalam konteks wilayah lain. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya pemetaan spasial dalam mengidentifikasi klaster permukiman, tingkat aksesibilitas, serta keterkaitan antar pusat dan wilayah sekitarnya. Namun, studi serupa dengan pendekatan evaluatif dan spasial di Kota Tomohon masih terbatas.

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pusat-pusat permukiman di Kota Tomohon melalui pendekatan skalogram, analisis sentralitas, analisis aksesibilitas, dan analisis gravitasi. Dengan memetakan pola dan hierarki permukiman, penelitian ini diharapkan mampu menilai sejauh mana implementasi dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dasar perencanaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pengembangan permukiman di Kota Tomohon.

Pusat – Pusat Permukiman

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 BAB I Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman

diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Hirarki Wilayah dan Pusat – Pusat Permukiman Perkotaan

Hirarki wilayah dan pusat-pusat permukiman di kawasan perkotaan menggambarkan susunan ruang yang dirancang untuk mengatur tingkat pelayanan dan peran wilayah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Salah satu prinsip dalam hirarki ini adalah pengelompokan berdasarkan peran pusat pelayanan, seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kawasan (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Susunan ini tercermin dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021.

Struktur Ruang Pusat Permukiman

Struktur ruang mencakup susunan pusat-pusat permukiman serta sistem jaringan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berjenjang dan saling terhubung. Struktur ruang kota sendiri merupakan cerminan dari sistem pelayanan kegiatan dalam kota, termasuk



jaringan infrastrukturnya, yang dirancang hingga batas waktu rencana pembangunan kota tersebut.

Dalam menganalisis struktur pusat permukiman, peneliti menerapkan empat jenis analisis utama yang mengacu pada RTRW Kota Tomohon serta ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 mengenai tata cara penyusunan, peninjauan, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi RTRW provinsi, kabupaten/kota, serta RDTR. yang terdiri dari :

Analisis Skalogram, yang berfungsi untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang dapat dikategorikan sebagai pusat permukiman berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas perkotaan yang tersedia.

Analisis Indeks Sentralitas, analisis ini digunakan untuk memahami dan juga mengetahui bagaimana hirarki atau struktur pusat-pusat kegiatan terbentuk dan berkembang di dalam suatu wilayah.

Analisis Aksesibilitas, untuk mengukur kemudahan suatu lokasi atau individu dalam mencapai suatu tujuan, seperti fasilitas pelayanan, pusat ekonomi, atau tempat kerja.

Analisis Gravitasi, analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya nilai gravitasi antar dua wilayah mencerminkan kuatnya daya tarik serta keterikatan hubungan di antara keduanya; semakin tinggi nilainya, maka semakin kuat pula interaksi dan konektivitas antar wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan spasial dan pendekatan gabungan

(kuantitatif dan kualitatif), dengan menggunakan empat jenis analisis: Skalogram, Indeks Sentralitas, Aksesibilitas, dan Gravitasi. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang dihimpun melalui studi pustaka, termasuk literatur dari buku dan artikel.

Dalam pelaksanaannya, metode penelitian ini mencakup tiga pokok variabel utama, yaitu fasilitas yang meliputi fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan untuk menilai ketersediaan sarana sebagai dasar mengetahui pola sebaran permukiman di Kota Tomohon. Selain itu, variabel jumlah penduduk digunakan sebagai parameter dalam analisis aksesibilitas dan gravitasi, sementara jarak dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam perhitungan kedua analisis tersebut guna membantu penentuan pusat permukiman.

Pendekatan spasial difokuskan untuk menilai persebaran dan ketersediaan fasilitas di wilayah Kota Tomohon, sedangkan pendekatan gabungan kuantitatif kualitatif digunakan untuk proses mengidentifikasi pusat permukiman melalui berbagai rumus dalam tahapan pada suatu analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon dahulunya merupakan salah satu kecamatan di dalam Kabupaten Minahasa yang kemudian di mekarkan pada tahun 2003 yang di sahkan dalam Kitab Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Minahasa.



Gambar 1 Peta Administrasi Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisa 2025

Analisis Ketersediaan Fasilitas Sarana Penunjang Permukiman di Kota Tomohon

Sarana perkotaan merupakan suatu sarana yang didalamnya memerlukan masyarakat atau penduduk dalam suatu lingkungan permukiman perkotaan yang di antaranya ada beberapa sarana yang termasuk sebagai berikut adalah ; sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perekonomian, sarana pemerintahan, sarana pelayanan umum, sarana peribadatan serta sarana sosial.

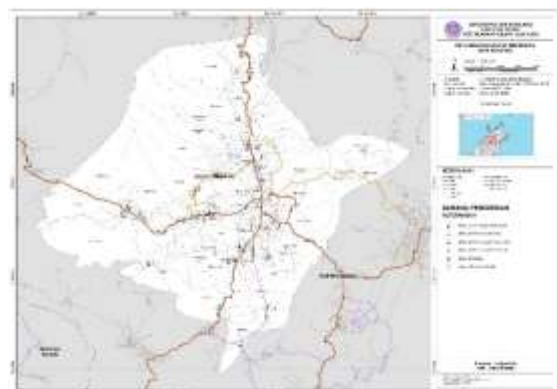
Sarana umumnya merupakan alat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas, sehingga dalam proses pengembangan wilayah sarana menjadi salah satu faktor yang mampu menunjang perkembangan daerah tersebut, sehingga di dapatkan sarana penunjang pusat permukiman di Kota Tomohon sebagai berikut

Tabel 1.

Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kota Tomohon

Kecamatan	PAU D	TK	SD	SMP	SMA	PT
Tomohon Tengah	3	9	2	-	-	-
Tomohon Selatan	-	10	17	5	2	1
Tomohon Barat	1	7	13	4	2	-
Tomohon Utara	3	9	17	5	3	2
Tomohon Timur	-	7	8	4	3	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Tomohon, 2025



Gambar 2 Peta Sarana Pendidikan Kota Tomohon

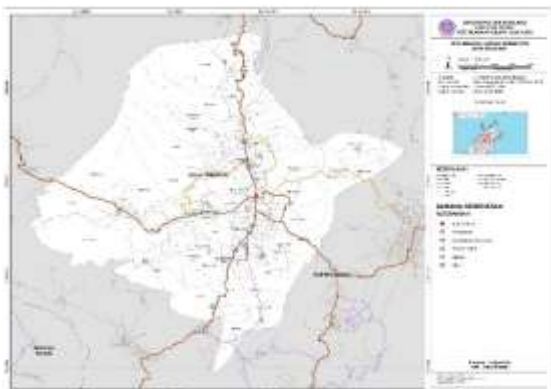
Sumbr : Hasil Analisa, 2025

Tabel 2. Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kota Tomohon

Kecamatan	RS	Puskes mas	Praktek Dokter	Apote k	Kli nik
Tomohon	2	3	5	10	3

Tengah					
Tomohon Selatan	1	4	2	4	-
Tomohon Barat	-	3	1	2	2
Tomohon Utara	-	3	4	5	5
Tomohon Timur	-	2	2	5	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Tomohon, 2025



Gambar 3 Peta Sarana Kesehatan Kota Tomohon

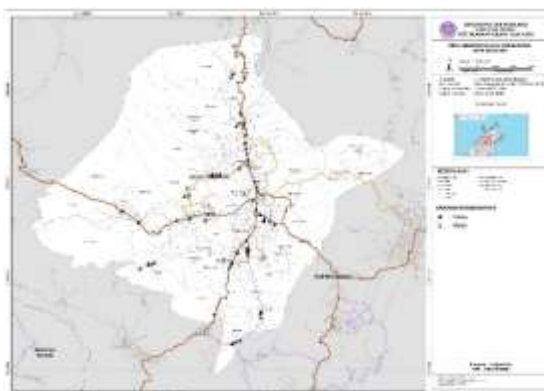
Sember : Hasil Analisis, 2025

Tabel 3. Ketersediaan Sarana Peribadatan di Kota Tomohon

Kecamatan	Gereja	Mesjid	Klenteng	Vihara	Pura
Tomohon Tengah	18	1	-	1	-
Tomohon Selatan	43	1	-	-	-
Tomohon Barat	17	-	-	-	-

Tomohon Utara	34	1	-	3	-
Tomohon Timur	19	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Tomohon, 2025



Gambar 4 Peta Sarana Peribadatan Kota Tomohon

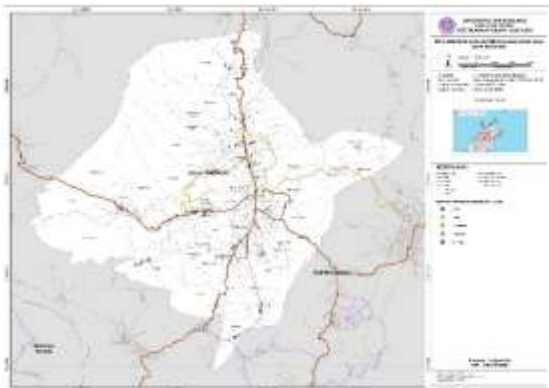
Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4. Ketersediaan Sarana Perekonomian di Kota Tomohon

Kecamatan	Pasar	Mall	Minimarket	Toko	Cafe	Hotel
Tomohon Tengah	1	1	13	4	24	5
Tomohon Selatan	-	-	10	18	-	9
Tomohon Barat	-	-	7	4	1	-
Tomohon Utara	1	-	7	11	26	13
Tomohon Timur	1	-	6	4	-	2

Timur						
-------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Tomohon, 2025



Gambar 5 Peta Sarana Perekonomian Kota Tomohon

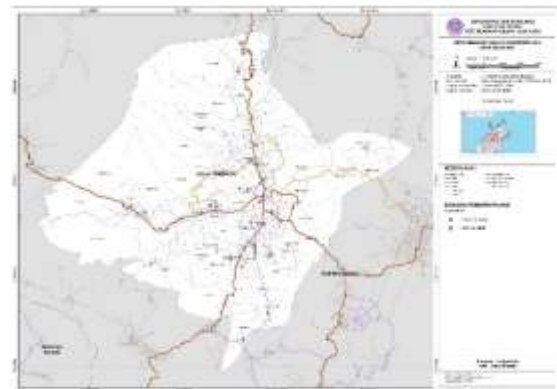
Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.

Ketersediaan Sarana Pemerintahan di Kota Tomohon

Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kantor Kelurahan
Tomohon Tengah	1	9
Tomohon Selatan	1	12
Tomohon Barat	1	8
Tomohon Utara	1	10
Tomohon Timur	1	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Tomohon, 2025

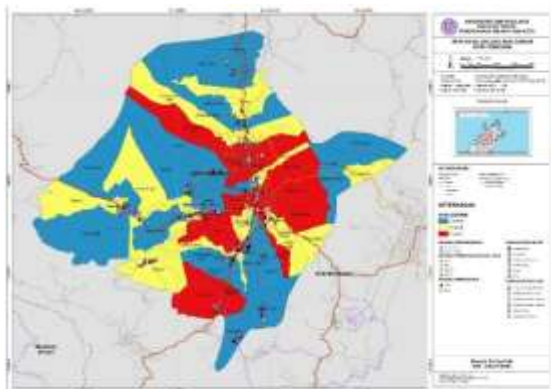


Gambar 6. Peta Sarana Pemerintahan Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Analisis Skalogram

analisis ini memiliki beberapa fasilitas yang ada akan dikelompokkan menjadi 5 sarana, terdapat masing-masing unit memiliki fasilitas pada kelurahan akan di hitung 1 = tersedia, dan yang memiliki 0 = Tidak tersedia di tiap kecamatan. Setelah itu mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan yang ada kemudian dihitung peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde dengan hasil gambar pada peta yang telah disatukan pada satu gambar dari tiap kelurahan pada suatu kecamatan. Kemudian hasil dari analisis skalogram menunjukkan bahwa kelurahan kamasi, talet 1, matani 3, kolongan, lansot, lahendong, walian, woloan 1, kakaskasen, kakaskasen 2, kakaskasen 3, paslaten 2 dan paslaten yang berada pada hirarki 1.



Gambar 7 Peta Analisis Skelogram Kota Tomohon

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis Indeks Sentralitas

Analisis indeks sentralitas merupakan analisis turunan yang dari analisis skelogram, analisis ini digunakan untuk mencari atau mengetahui suatu hirarki/struktur pusat-pusat kegiatan terbentuk dan berkembang dalam suatu wilayah. Pendekatan ini didasarkan pada teori aglomerasi Alfred Marshall, yang menekankan pentingnya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari konsentrasi kegiatan di satu Lokasi. Rumus nilai sentralitas adalah sebagai berikut :

$$C = \frac{t}{T}$$

Keterangan :

C : Bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas

t : Nilai sentralitas total yaitu 100 / 1000 (jika unit banyak)

T : Jumlah total atribut dalam system

Setelah bobot di tiap fasilitas dapat, selanjutnya

dihitung Indeks Sentralitas di tiap kecamatan dengan rumus sebagai berikut :

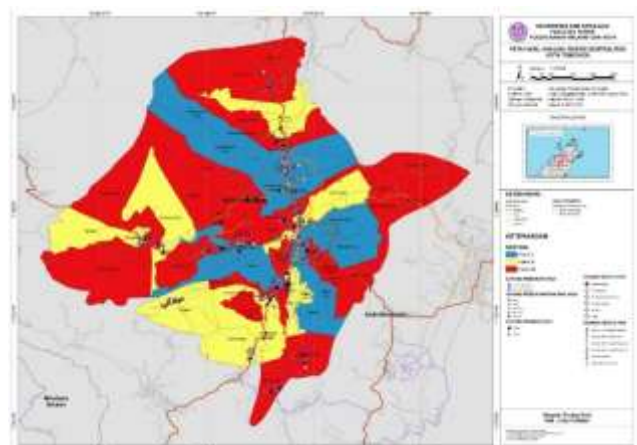
$$C = F \times C_f$$

Keterangan :

F : Jumlah di tiap fasilitas masing-masing kecamatan
C

F : Bobot per fasilitas

Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan dihitung peringkat hirarki yang didapat menggunakan suatu rumus jangkauan orde yang didapatkan dengan hasil gambar peta yang telah disatukan pada satu gambar dari tiap kelurahan pada kecamatan. berikut adalah hasil analisis indeks sentralitas di kota tomohon adalah Kelurahan Matani 3, Lansot, Walian, Woloan 1, Woloan 2, Kakaskasen 1, Kakaskasen, Kakaskasen 3, Kakaskasen 2, Paslaten 1, Dan Paslaten 2 yang berada pada hirarki 1.



Gambar 8. Peta Analisis Indeks Sentralitas Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Analisis Aksesibilitas

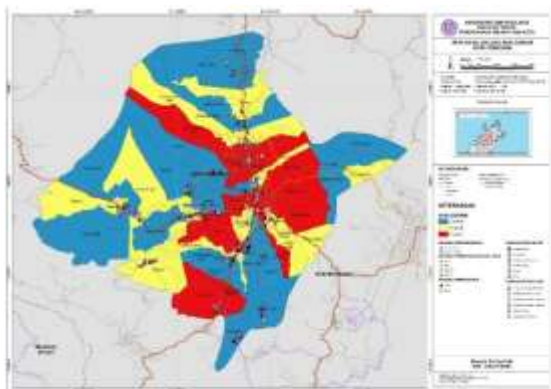
Analisis Aksesibilitas mengacu pada ukuran sejauh mana suatu lokasi dapat dijangkau dari lokasi lain melalui sistem transportasi yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan penentuan aksesibilitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{JP \text{ Kelurahan } A + JP \text{ Kecamatan}}{JKel^{\wedge}Kondisi \text{ Jalan}}$$

Keterangan :

JP : Jarak Kelurahan A ke Ibukota Kecamatan

Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan kemudian dihitung peringkat hirarki dengan menggunakan suatu rumus jangkauan orde ditambahkan hasil gambar peta yang disatukan pada suatu satu gambar dari setiap kelurahan pada kecamatan. Berikut adalah hasil dari analisis aksesibilitas di Kota Tomohon adalah Kelurahan Walian, Kolongan, Matani 2, Talete 1, Matani 3, Palaten 1, Woloan 1 Utara, Woloan Satu, dan Kakaskasen Tiga yang berada pada hirarki 1.



Gambar 8. Peta Analisis Aksesibilitas Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Analisis Gravitasi

Analisis Gravitasi atau interaksi umumnya digunakan untuk mengevaluasi tingkat kekuatan hubungan antara dua wilayah, di mana salah satu wilayah berperan sebagai pusat yang memiliki daya tarik terhadap wilayah lainnya. Untuk penentuan besaran interaksi antar kelurahan utama ke kelurahan lainnya menggunakan persamaan sebagai berikut

$$i = \frac{P1 * P2}{J}$$

Sumber Taringan,2009

Keterngan :

i : Besarnya interaksi antar kelurahan utama ke kelurahan lainnya

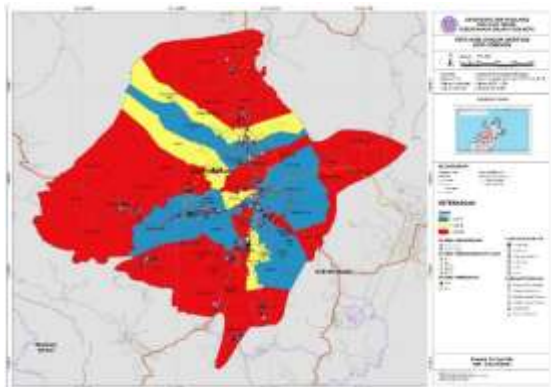
P1 : merupakan jumlah penduduk pada kelurahan yang berperan sebagai pusat,

P2 : adalah jumlah penduduk pada kelurahan tujuan,

J : menunjukkan jarak antara kedua kelurahan.

Setelah nilai total interaksi dihitung, setiap kelurahan kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkatan hirarki menggunakan rumus jangkauan orde. Hasil perhitungan ini divisualisasikan dalam bentuk peta yang menggabungkan seluruh kelurahan dalam setiap kecamatan. Berikut merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan.

gravitasi di Kota Tomohon adalah Kelurahan Matani 3, Talete 1, Matani 2, Kolongan, Walian, Lansot, Woloan 1, Woloan 1 Utara, Woloan 2, Woloan 3, Kakaskasen 3, Kakaskasen 2, Paslaten 1 dan Paslaten 2 berada pada hirarki 1



Gambar 9. Peta Hasil Analisis Gravitasi Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil Analisis Penentuan Pusat Permukiman di Kota Tomohon

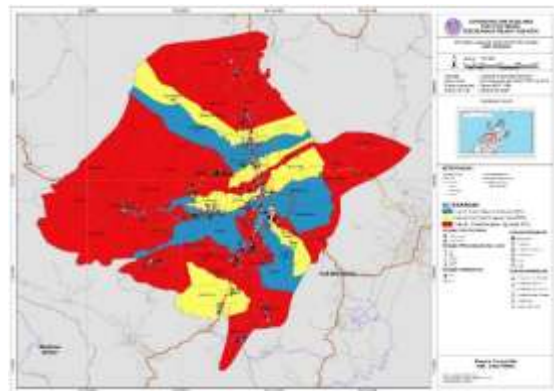
Berdasarkan 4 hasil analisis yang didapat dengan menggunakan rumus jangkauan orde menggunakan 3 kelas dan hasil analisis yang ditentukan 3 kategori yaitu Pusat Pelayanan Kawasan, Sub Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat Pelayanan lingkungan. Terdapat rumus jangkauan orde sebagai berikut.

$$\text{Jangkauan Orde} = \frac{\text{Nilai Maks} - \text{Nilai Min}}{\text{Kelas}}$$

Sumber : Edward W, 1918

Setelah mendapatkan hasil dari 4 analisis di atas dengan menggunakan perhitungan jangkauan orde kelurahan yang menduduki hirarki I masuk di kategori Pusat Pelayanan Kawasan, sedangkan untuk hirarki II masuk kategori Sub Pusat Pelayanan Kawasan, yang terakhir hirarki III masuk di kategori Pusat Pelayanan Lingkungan. Dan dari 4 Analisis di atas adalah Kelurahan Lansot, Walian, Woloan 1, Woloan 2, Kakaskasen 2, Kakaskasen 3, Paslaten 1, dan Paslaten 2 berada pada hirarki 1 yang berarti menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) yang ada di tiap kecamatan di Kota Tomohon. Dibawah ini terdapat keseluruhan peta pusat permukiman di kota tomohon



Gambar 10. Peta Sistem Pusat Permukiman di Kota Tomohon

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Evaluasi Pusat - Pusat Permukiman dengan RTRW Kota Tomohon 2014-2034

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan pusat-pusat permukiman dalam rencana tata ruang wilayah Kota Tomohon tahun 2014 sampai pada 2034 dan hasil analisis pada tahun 2025, ditemukan bahwa sebagian besar penetapan pusat permukiman telah sesuai, namun masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Pada kategori Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dari empat kelurahan yang ditetapkan, dua di antaranya—yakni Kelurahan Matani 3 dan Kolongan di Kecamatan Tomohon Tengah—telah sesuai dengan hasil analisis. Sementara itu, Kelurahan Kamasi dan Talete yang juga berada di kecamatan yang sama dinilai tidak sesuai. Berdasarkan kondisi eksisting dan distribusi fasilitas pelayanan, kedua kelurahan tersebut



lebih tepat dikategorikan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).

- Untuk kategori Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), hanya satu kelurahan yang dinilai sesuai, yaitu Kelurahan Lahendong di Kecamatan Tomohon Selatan. Empat kelurahan lainnya menunjukkan ketidaksesuaian. Kelurahan Paslaten di Kecamatan Tomohon Timur justru menunjukkan peran yang lebih dominan dan direkomendasikan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sementara itu, Kelurahan Rurukan, Kinilow, dan Tara-Tara menunjukkan karakteristik yang lebih sesuai sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL),
- Adapun pada kategori Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagian besar kelurahan yang ditetapkan telah sesuai dengan hasil evaluasi. Delapan dari sepuluh kelurahan dinilai tepat berada dalam kategori PPL, antara lain Kelurahan Tinoor, Wailan, Matani 1, Pinaras, Tumatangtang, Pangolombian, dan Tondangow. Namun demikian, dua kelurahan lainnya yaitu Kakaskasen 2 di Kecamatan Tomohon Utara dan Woloan Dua di Kecamatan Tomohon Barat menunjukkan potensi pelayanan kawasan yang lebih luas, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Secara keseluruhan, dari 19 kelurahan yang dianalisis dalam tiga kategori pusat pelayanan, sebanyak 11 kelurahan telah sesuai dengan penetapan RTRW, sedangkan 8 kelurahan lainnya menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan perencanaan tata ruang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi ketersediaan fasilitas penunjang permukiman yang tersebar di Kota Tomohon di dapatkan 5 jenis sarana dengan total keseluruhan adalah sebanyak 593 Unit sarana yang kemudian di bahas berdasarkan sarana sebagai berikut. Sarana Pendidikan, berdasarkan hasil identifikasi terdapat total 162 Sarana pendidikan yang tersebar di Kota Tomohon, dengan jumlah sarana pendidikan terbanyak terdapat di Kecamatan Tomohon Utara dengan total 39unit sarana dan Kecamatan paling sedikit adalah Kecamtan Tomohon Timur dengan total 22 unit sarana. Sarana Kesehatan berdasarkan hasil identifikasi terdapat total 71 Sarana kesehatan yang tersebar di Kota Tomohon, dengan jumlah sarana kesehatan terbanyak terdapat di Kecamatan Tomohon Tengah dengan total 23 unit sarana dan Kecamatan paling sedikit adalah Kecamtan Tomohon Barat dengan total 8 unit sarana, Sarana Pemerintahan, berdasarkan hasil identifikasi terdapat total 49 Sarana Pemerintahan yang tersebar di Kota Tomohon, dengan jumlah Sarana Pemerintahan terbanyak terdapat di Kecamatan Tomohon Selatan dengan total 13 unit sarana dan Kecamatan paling sedikit adalah Kecamatan Tomohon Timur dengan total 6 unit sarana. Sarana Peribadatan, berdasarkan hasil identifikasi terdapat total 138 Sarana Peribadatan yang tersebar di Kota Tomohon, dengan jumlah Sarana Peribadatan terbanyak terdapat di Kecamatan Tomohon Selatan dengan total 44 unit sarana dan Kecamatan paling sedikit adalah Kecamtan Tomohon Barat dengan total 17 unit sarana. Sarana Perdagangan dan Jasa, berdasarkan hasil identifikasi terdapat total 168 Sarana Perdagangan dan jasa yang tersebar di Kota Tomohon, dengan jumlah Sarana Perdagangan



dan Jas terbanyak terdapat di Kecamatan Tomohon Utara dengan total 58 unit sarana dan Kecamatan paling sedikit adalah Kecamatan Tomohon Barat dengan total 12 unit sarana.

Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa adanya beberapa ketidaksesuaian Pusat-Pusat Permukiman yang di tetapak oleh Rencana Tata Ruang

tepatnya di Kelurahan Kamasi dan Talete, berdasarkan hasil analisa 2 kawasan ini di rekomendasikan menjadi Sub pusat pelayanan Kota (SPPK). Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), adanya ketidak sesuaian di 4 kelurahan yang menjadi SPPK yaitu Kelurahan Pasalaten Kecamatan Tomohon Timur yang berdasarkan hasil analisa di rekomendasikan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan, dan Kelurahan Rurukan yang di rekomendasikan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), adpula untuk ketidaksesuaian di Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara dan Kelurahan Tara-Tara di Kecamatan Tomohon Barat yang di rekomendasikan menjadi Pusat-Pelayanan Lingkungan (PPK). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), ketidaksesuaian di Kelurahan Kakaskasen 2 di Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Wolon Dua di Kecamatan Tomohon Barat yang di rekomendasikan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Saran untuk pemerintah setempat, Pemerintah Kota Tomohon disarankan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang permukiman, khususnya di kecamatan yang memiliki jumlah sarana relative rendah, seperti Kecamatan Tomohon Barat dan pelayanan antar wilayah.

Optimalisasi Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penetapan pusat-

Kota Tomohon tahun 2014 sampai 2034 dengan hasil analisa, yang mana ketidaksesuaian terdapat di beberapa jenis penetapan pusat permukiman, diantaranya adalah Pusat pelayanan kawasan (PPK) , adanya ketidaksesuaian di 2 kelurahan yang menjadi pusat pelayanan kawasan di Kecamatan tomohon Tengah dan Tomohon Timur agar terjadi kesetaraan akses.

pusat pelayanan permukiman sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Tomohon pada tahun 2014 sampai 2034, dengan memperhatikan keadaan aktual serta kebutuhan masyarakat, sehingga fungsi pusat pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Putri, R. A., & Istanabi, T. (2022). Kajian Pola Persebaran Permukiman Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 4(2), 241-257.
- Wagey, L. J., Tilaar, S., & Takumansang, E. D. (2023). Sistem Pusat-Pusat Permukiman Di Kota Manado Menggunakan Indeks Sentralitas Terbobot. *SPASIAL*, 11(1), 1-8.
- Latue, P. C., Manakane, S. E., & Rakuasa, H. (2023). Analisis Perkembangan Kepadatan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2013 dan 2023 Menggunakan Metode Kernel Density. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(1), 26-34.
- Muflih Nasution, A. (2019). Analisis Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kota Medan. *Jaur (Journal Of Architecture And Urbanism Research)*, 3(1), 27-46.
- Muliana, R., Astuti, P., & Fadli, A. (2018). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar: Study of Service Centers in Kampar District. *Jurnal Saintis*, 18(1), 59-72.
- Pelambi, M. M., Tilaar, S., & Rengkung, M. M. (2016). Identifikasi Pola Sebaran Permukiman Terencana Di Kota Manado. *Spasial*, 3(1), 55-65.



- Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Utari, M. E. S. (2015). Analisis sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1)..
- Utari, M. E. S. (2015). Analisis sistem pusat pelayanan permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1)..
- Wulandari, N. D., & Setyowati, D. L. (2020). Analisis Pola Persebaran Permukiman Tahun 1998, 2006 Dan 2019 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Geo-Image Journal*, 9(1), 65-71.